

PERJANJIAN KINERJA

BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG R.I

TAHUN 2023



ESELON II

INSPEKTUR WILAYAH II BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suradi, S.H., S.Sos., M.H

Jabatan : Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Sugiyanto, S.H.

Jabatan : Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2023, dengan ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 9 Januari 2023

Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI
Pihak Kedua

Sugiyanto, S.H.

Inspektur Wilayah II
Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
Pihak Pertama

Suradi, S.H., S.Sos., M.H.

PERJANJIAN KINERJA (PK) 2023 INSPEKTUR WILAYAH II BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Terwujudnya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan	-
	Persentase penanganan pengaduan tepat waktu	75%		-
	Persentase hukuman disiplin yang dipublikasikan	100%		-
	Persentase laporan hasil pemeriksaan kasus yang tepat waktu	100%		Rp1.694.098.000
Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif dan efisien	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti	80%		-
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti	100%		Rp100.000.000
	Persentase laporan hasil pengawasan yang tepat waktu	100%		-
Terselenggaranya efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan manajemen peradilan dan administrasi umum	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	51 LHP		Rp1.634.408.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan audit kinerja	20 LHP		Rp847.102.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	4 LHP		Rp132.414.153
	Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	4 LHP	Rp247.300.000	
	Peningkatan Zona Integritas	50 LHP	Rp1.550.000.000	
	Jumlah Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan (semua Irwil-Jakarta)	1 Kegiatan	Rp162.500.000	
	Jumlah Quality Assurance yang terlaksana (semua Irwil-Jakarta)	1 Kegiatan	Rp100.000.000	
	Jumlah Consulting yang terlaksana	1 Kegiatan	Rp100.000.000	

	Jumlah LO (Liaison Officer) yang terlaksana	1 Kegiatan		Rp25.000.000
	Pemeriksaan Probity Barang & Jasa	6 LHP		Rp100.000.000
	Analisa Kebijakan	2 LHP		Rp60.000.000
	Supervisi Pengawasan Wil. I – IV	11 LHP		Rp144.736.842
	Monev PIPK	1 LHP		Rp7.200.000
	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4 LHP		Rp28.800.000
	PMPRB Badan Pengawasan	4 Kegiatan		Rp50.320.000

Jumlah Anggaran : Rp6.983.878.995,-

Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan